



RUMAH DETENSI IMIGRASI  
PUSAT TANJUNG PINANG

# 2023

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**RUMAH DETENSI IMIGRASI  
PUSAT TANJUNG PINANG**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah serta Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang di masa yang akan datang.



Tanjung Pinang, 03 Januari 2024  
Kepala,



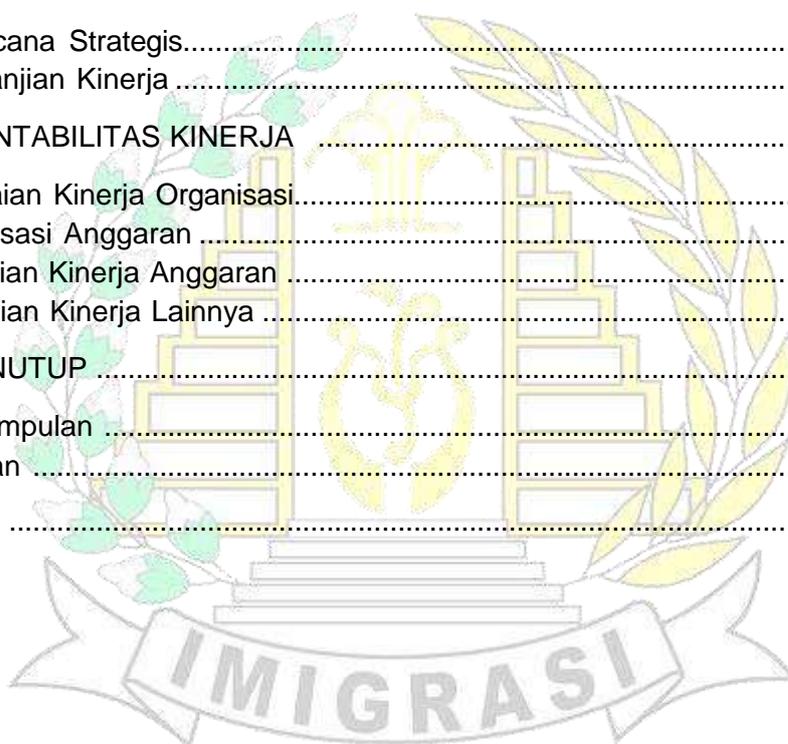
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agung Prianto

NIP. 19720827 199903 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	5
C. Maksud dan Tujuan.....	15
D. Aspek Strategis .....	15
E. Isu Strategis .....	15
F. Sistematika Laporan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	18
A. Rencana Strategis.....	18
B. Perjanjian Kinerja .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran .....	29
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	31
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	32
BAB IV PENUTUP .....	34
A. Kesimpulan .....	34
B. Saran .....	35
LAMPIRAN .....	36



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

### CAPAIAN KINERJA (IKK) TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,90 Indeks	120%
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,63 Indeks	116%
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks	3,86 Indeks	123%

Capaian Sasaran Kegiatan diatas dibiayai dari DIPA Rudenim Pusat Tanjung Pinang dengan persentase 98,16%. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 merupakan indikasi bahwa sistem akuntabilitas kinerja pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
		(Rp)	%	
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>4.236.917.000</b>	<b>4.059.527.979</b>	<b>95,81</b>	<b>177.389.021</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	4.236.917.000	4.059.527.979	95,81	177.389.021
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>10.386.717.000</b>	<b>10.295.150.836</b>	<b>99,12</b>	<b>91.566.164</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	10.386.717.000	10.295.150.836	99,12	91.566.164



Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Pada tahun 2023 ini, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai berikut:



Piagam Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik II Periode Januari s.d. Mei TA 2022.



Piagam Penghargaan Satuan Kerja berprestasi atas Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang (Pagu Rp 5 Milyar s.d. Rp 25 Milyar) Periode Triwulan I 2023.



Piagam Penghargaan Satuan Kerja meraih Predikat Terbaik II Atas Capaian Implementasi SAKIP Tahun 2022 Predikat (BB) Oktober 2022-2023.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Direktur Jenderal Imigrasi dan secara administratif dan fasilitatif berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, Rumah Detensi Imigrasi Pusat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dibidang Imigrasi.

Unit Pelaksana Teknis dianggap perlu untuk membuat Perjanjian Kinerja antara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah:

- 1.sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3.sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4.sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5.sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta tindak lanjut atas restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah untuk melaporkan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023. Adapun tujuannya antara lain untuk penyediaan bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen, perencanaan pada periode yang datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang dan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

## B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 1. Tugas

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan dan deportasi.

### 2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01.2009 Tahun 2009, Rumah Detensi Imigrasi Pusat mempunyai fungsi:

- a) pendetensian;
- b) pengisolasian;
- c) pemindahan;
- d) pemulangan;
- e) deportasi dan pengusulan penangkalan;
- f) pelaksanaan fasilitatif penempatan Orang Asing ke negara ketiga dan manajemen ketatausahaan.

Susunan organisasi pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang terdiri dari:

#### a) Bagian Tata Usaha

Menyelenggarakan tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugasnya bagian tata usaha dibantu oleh:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- 2) Subbagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 3) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.

#### b) Bidang Registrasi Dan Perawatan

Menyelenggarakan tugas melaksanakan registrasi, administrasi, perawatan, kesehatan deteni, pengusulan penangkalan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas bidang Registrasi dan Perawatan dibantu oleh:

- 1) Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas melakukan pra penempatan, pencatatan, identifikasi dan verifikasi identitas berupa dokumen dan data-data deteni, penyimpanan barang-barang milik deteni, pembuatan surat pemberitahuan pendetensian, pengusulan penangkalan, serta evaluasi dan penyusunan laporan;
- 2) Kepala Seksi Perawatan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makan dan minum untuk deteni;
- 3) Kepala Seksi Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan penyiapan kebutuhan kesehatan, fasilitas kegiatan hiburan dan olah raga, kunjungan tenaga medis, rohaniwan, serta kegiatan ibadah untuk deteni.

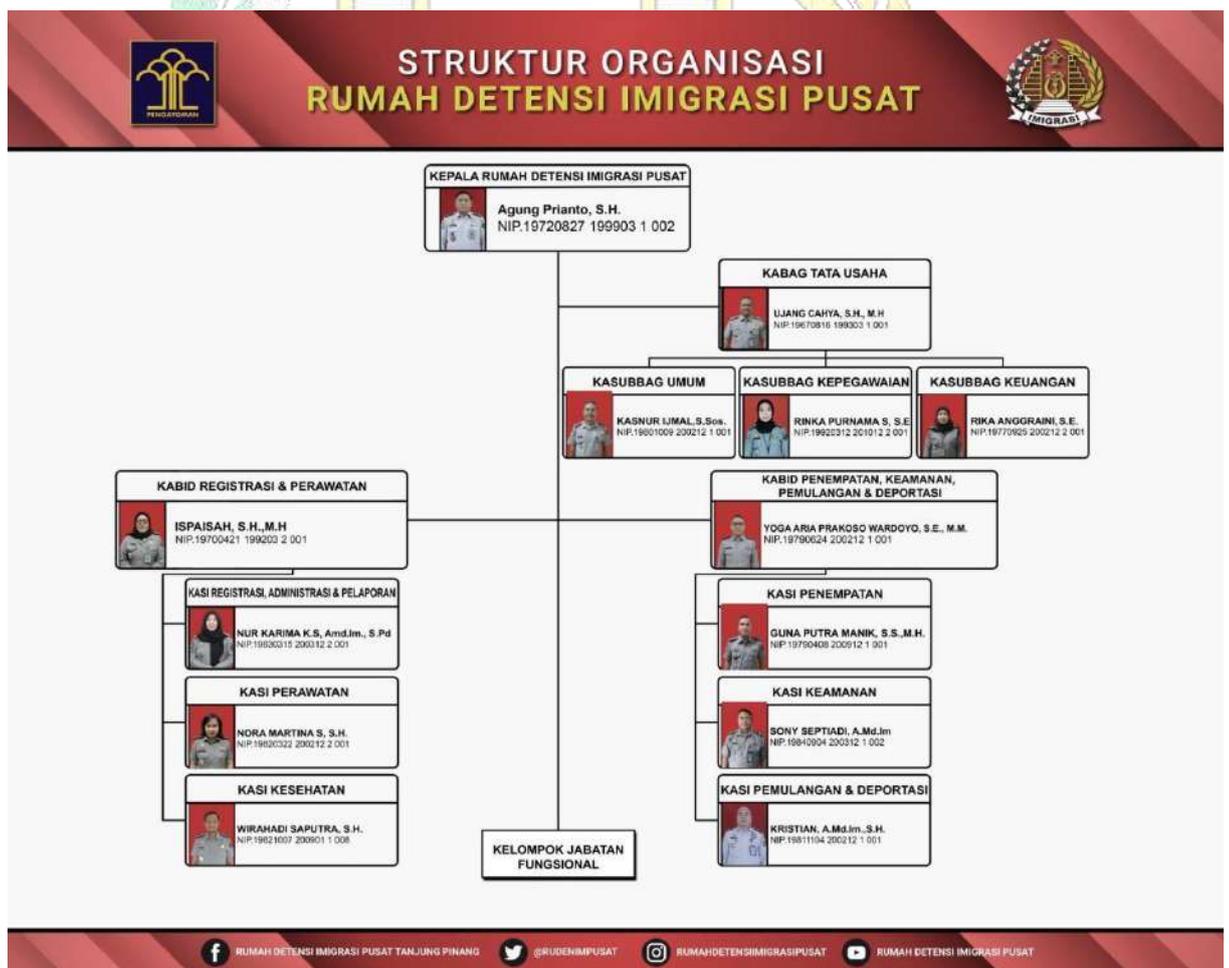
c) Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan Dan Deportasi

Menyelenggarakan tugas melaksanakan penempatan, pengamanan, ketertiban, pengisolasian, pemindahan deteni antar Rumah Detensi Imigrasi dan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan atau deportasi. Dalam pelaksanaan tugas bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi dibantu oleh;

- 1) Kepala Seksi Penempatan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan dan perpindahan deteni ke luar kamar sel atau barak dan antar Rudenim;
- 2) Kepala Seksi Keamanan, yang mempunyai tugas melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, penjagaan di dalam lingkungan Rudenim, pengaturan kunjungan masuk dan ke luar, pengkoordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan, dan deportasi deteni, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan;
- 3) Kepala Seksi Pemulangan dan Deportasi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemulangan dan deportasi.

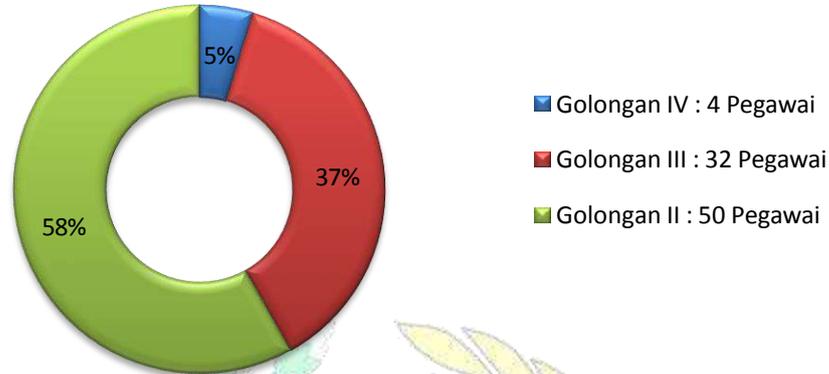
3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang sebagai berikut:

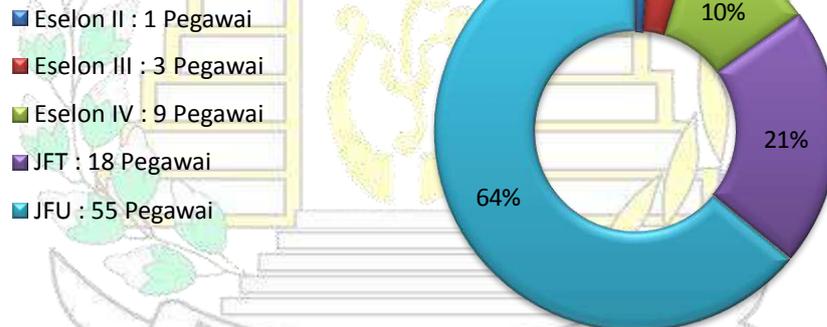


Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat sebanyak 86 pegawai yang terdiri:

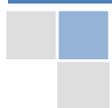
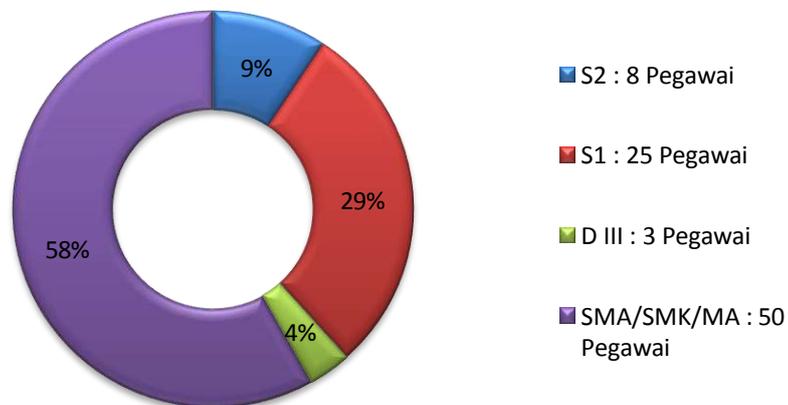
**Pegawai Rudenim Pusat Tanjung Pinang  
berdasarkan Golongan  
Jumlah: 86 Pegawai**



**Pegawai Rudenim Pusat Tanjung Pinang  
berdasarkan Eselon  
Jumlah: 86 Pegawai**



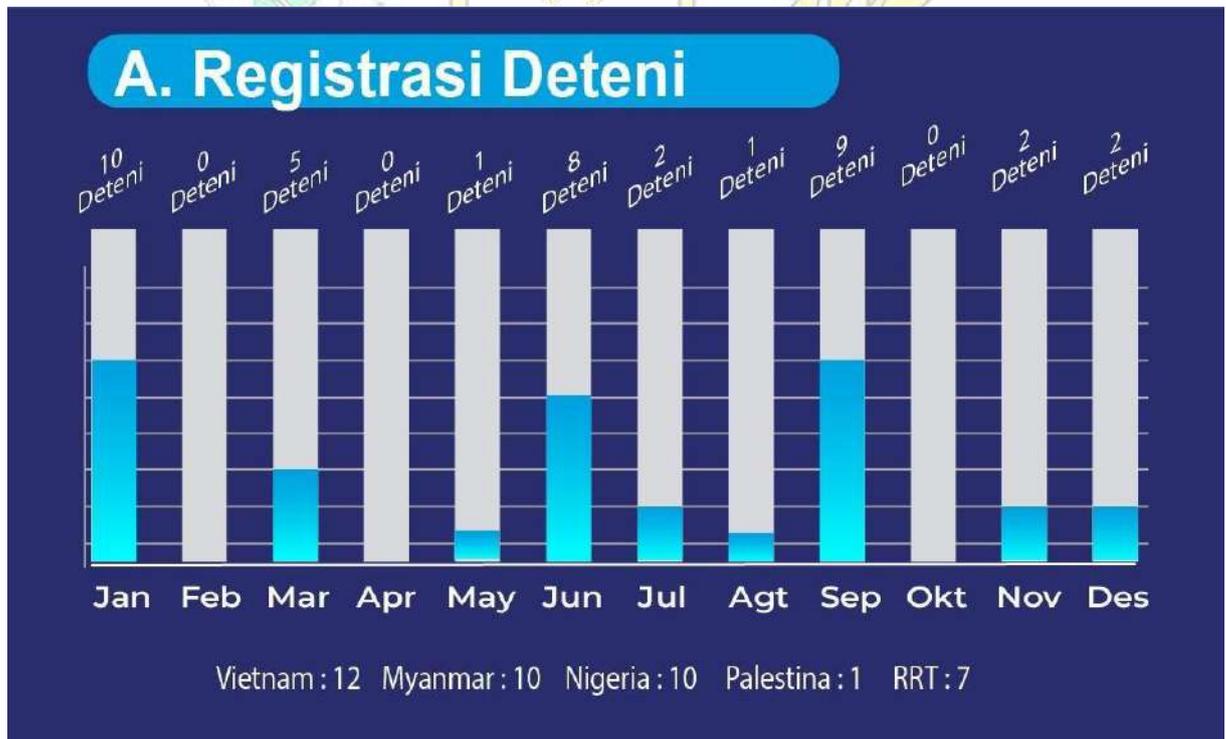
**Pegawai Rudenim Pusat Tanjung Pinang  
berdasarkan Pendidikan  
Jumlah: 86 Pegawai**



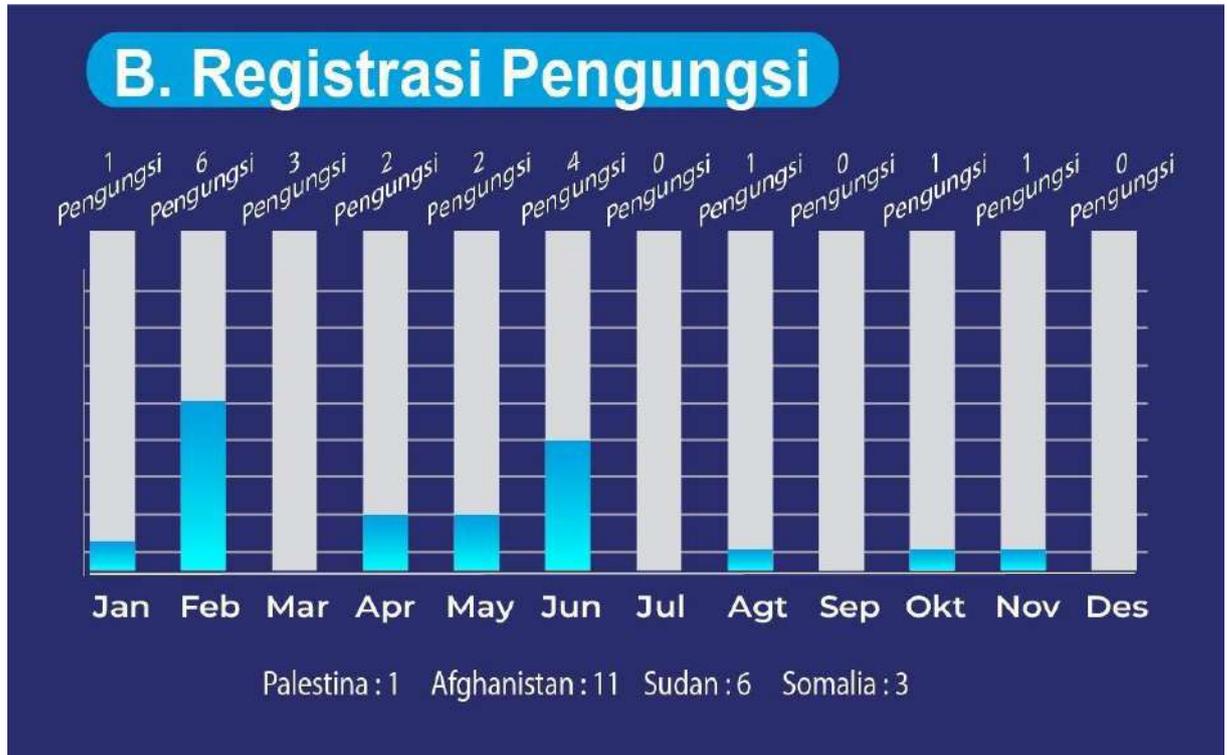
Bidang Substantif pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang meliputi Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi (PKPD) dan Bidang Registrasi dan Perawatan (Regwat). Selama tahun 2023 Bidang Regwat telah melakukan registrasi deteni dan pengungsi masuk ke Rudenim Pusat sebanyak 61 orang dengan rincian sebagai berikut:



Kegiatan registrasi Deteni pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 40 orang dengan rincian sebagai berikut:



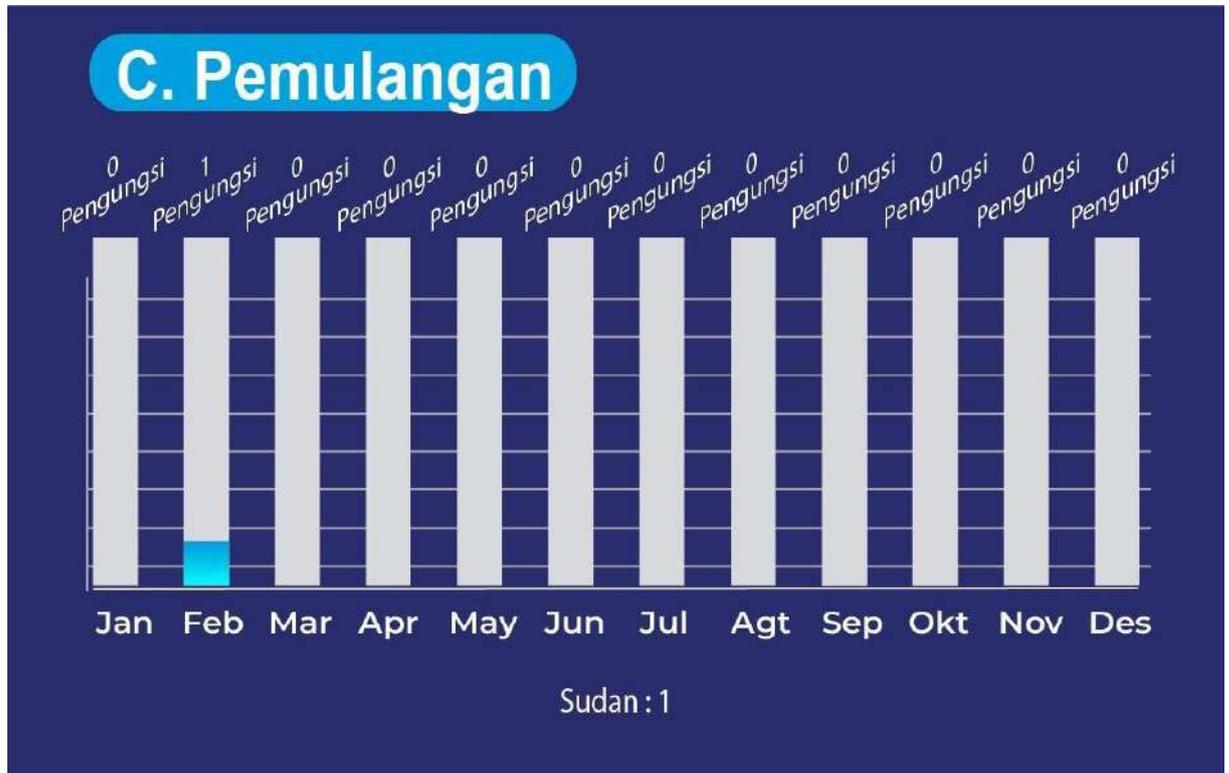
Kegiatan Registrasi Pengungsi pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut:



Bidang PKPD telah melaksanakan kegiatan Pemulangan, Deportasi, serta Pemandahan terhadap deteni maupun pengungsi yang berada di bawah pengawasan Rudenim Pusat Tanjung Pinang pada tahun 2023 sebanyak 147 orang dengan rincian sebagai berikut:



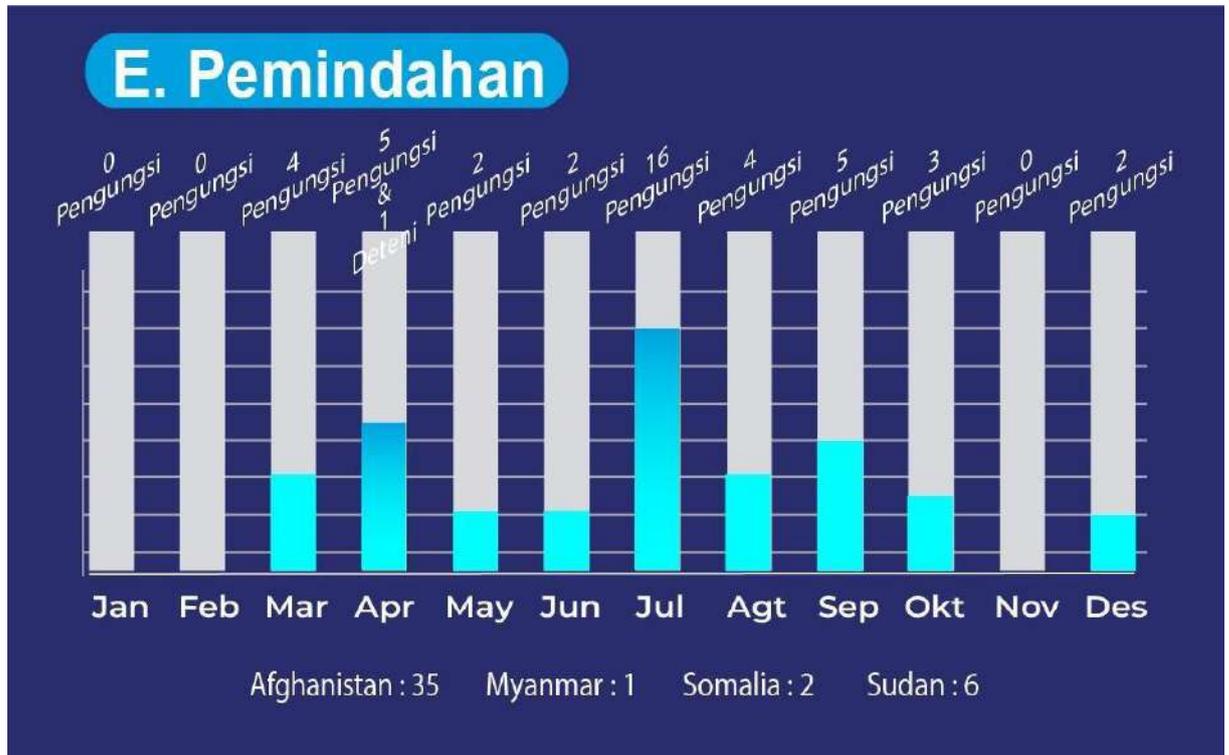
Kegiatan Pemulangan Deteni pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 1 orang dengan rincian sebagai berikut:



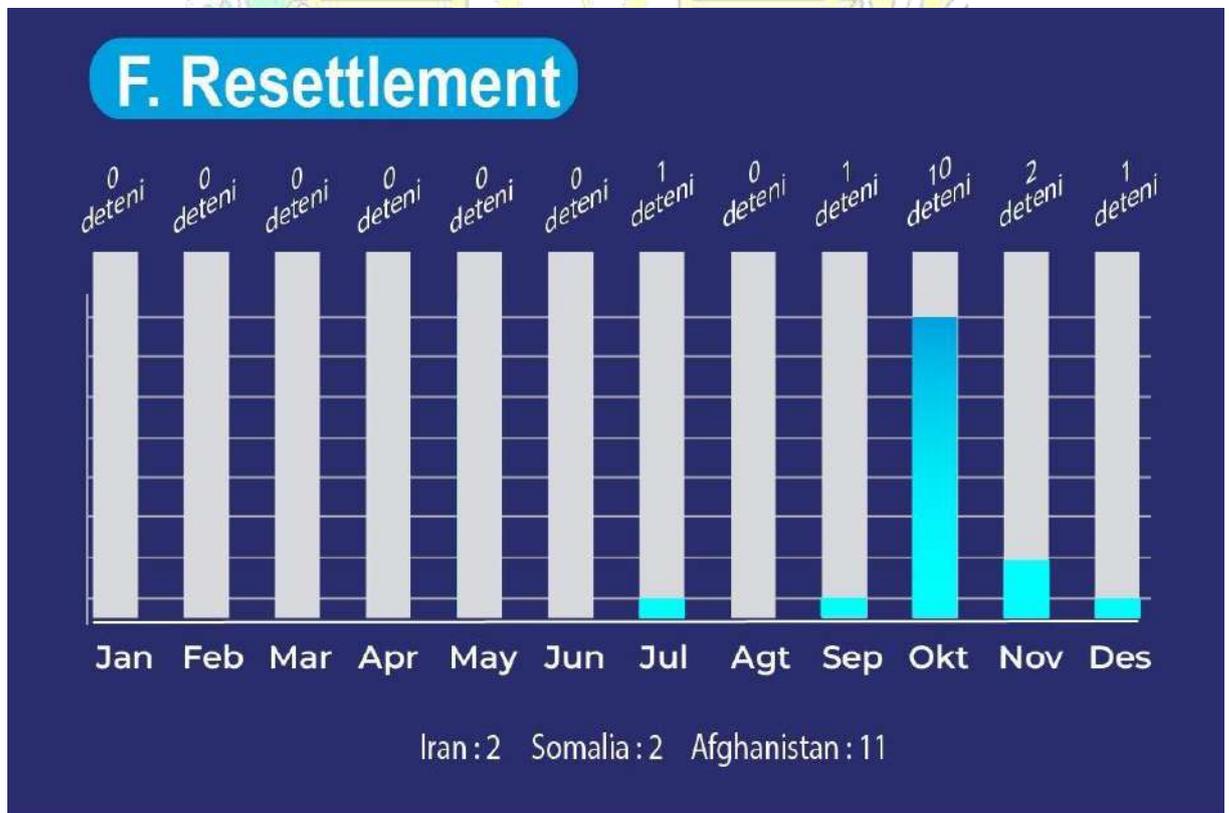
Kegiatan Deportasi Deteni pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 87 orang dengan rincian sebagai berikut:



Kegiatan pemindahan Deteni pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 44 orang dengan rincian sebagai berikut:



Kegiatan *Resettlement* Deteni pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut:



Selama periode tahun 2023 jumlah Deteni dan Pengungsi yang berada dibawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang adalah sebagai berikut:

No	Warga Negara	Rudenim Pusat	Hotel Kolekta		AND Sekupang	Hotel Bhadra	Mandiri		Jumlah		
			Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Afghanistan	0	59	62	143	256	2	7	460	69	529
2	Ethiopia	0	1	3	0	0	0	0	1	3	4
3	Filipina	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Ghana	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
5	Irak	0	10	6	1	0	0	0	11	6	17
6	Iran	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	Myanmar	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
8	Nigeria	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
9	Pakistan	0	0	0	3	6	0	0	9	0	9
10	Palestina	2	5	6	2	0	0	0	9	6	15
11	Pantai Gading	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Senegal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Somalia	0	9	8	5	25	0	0	39	8	47
14	Sudan	0	29	30	12	39	3	3	83	33	116
15	Uganda	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	India	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	Thailand	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total		24	228		166	326	15		633	126	759

1. Jumlah Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Keterangan
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak		
1	India	1	0	0	0	1	
2	Filipina	1	0	0	0	1	
3	Ghana	1	0	0	0	1	
4	Iran (FR)	1	0	0	0	1	
5	Nigeria	12	0	0	0	12	
6	Palestina	2	0	0	0	2	
7	Pantai Gading	1	0	0	0	1	
8	Uganda	1	0	0	0	1	
9	Senegal	1	0	0	0	1	
10	Myanmar	2	0	0	0	2	
11	Thailand	1	0	0	0	1	PSDKP Batam
Total		24	0	0	0	24	

2. Jumlah Pengungsi di Hotel Kolekta Batam

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah		
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Afghanistan	35	24	28	34	59	62	121
2	Ethiopia	1	0	1	2	1	3	4
3	Irak	4	5	3	4	9	7	16
4	Palestina	3	2	2	4	5	6	11
5	Somalia	5	4	6	2	9	8	17
6	Sudan	11	18	11	19	29	30	59
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	<b>228</b>		

3. Jumlah Pengungsi di Akomodasi Non Detensi (AND) Sekupang Batam

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	
1	Afghanistan	143	0	0	0	143
2	Irak	1	0	0	0	1
3	Pakistan	3	0	0	0	3
4	Palestina	2	0	0	0	2
5	Somalia	5	0	0	0	5
6	Sudan	12	0	0	0	12
<b>Total</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>

4. Jumlah Pengungsi di Bhadra Resort Bintang

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	
1	Afghanistan	256	0	0	0	256
2	Pakistan	6	0	0	0	6
3	Somalia	25	0	0	0	25
4	Sudan	39	0	0	0	39
<b>Total</b>		<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>

5. Jumlah Pengungsi Mandiri

No	Negara	Laki-laki		Perempuan		Jumlah			Ket
		Dewasa	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Afghanistan	0	2	5	2	2	7	9	CH Bhadra
2	Sudan	0	3	3	0	3	3	6	CH Bhadra
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>15</b>			

#### 4. Tata Nilai

##### a) Tata Nilai PASTI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kemenkumham mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif meliputi:

- 1) Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- 2) Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- 3) Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- 4) Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

##### b) Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Adapun Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

- 1) Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.

- 7) Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja Tahun 2023. Disamping itu, Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

### D. ASPEK STRATEGIS

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) menunjukkan eksistensinya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Dengan adanya kedua peraturan tersebut, Rudenim telah dapat melakukan aktifitas dan operasional dalam hal Penindakan Keimigrasian seperti Pendetensian, Pengisolasian, Pemulangan dan Pendeportasian.

Semakin meningkatnya arus kedatangan imigran ilegal (Pencari Suaka/Pengungsi) di Indonesia maka dibangunlah gedung Rumah Detensi Imigrasi terbesar di Indonesia yang terletak di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Adapun aspek pentingnya bagian pengawasan keimigrasian pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia serta terhadap orang asing yang diduga akan menjadi pencari suaka atau pengungsi tersebut.

### E. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Tahun 2023, berikut adalah isu strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang pada Tahun 2023 dengan uraian:

#### 1. Bagian Tata Usaha

- a) belum maksimalnya pegawai dalam pembaharuan SKP dan PPKP pada SIMPEG Kemenkumham;
- b) minimnya pengetahuan pegawai terkait tugas dan fungsi dan juga keimigrasian;
- c) belum meratanya perpindahan jabatan sehingga terjadi kejenuhan bagi pegawai yang sudah menduduki suatu jabatan tertentu dalam waktu lama;
- d) kurangnya tempat untuk menaruh arsip keuangan;

- e) belum adanya tenaga SDM yang secara khusus melaksanakan tugas Protokoler di Rudenim Pusat Tanjung Pinang;
- f) prasarana dan sarana pada tiap bidang masih minim (kelancaran internet, CCTV, alat pengamanan beserta alat komunikasi, dll)

## 2. Bidang Registrasi dan Perawatan

- a) tidak tersedianya ruangan khusus bagi deteni yang sakit selain blok isolasi;
- b) tidak tersedianya blok deteni khusus bagi deteni yang mengalami gangguan psikologis;
- c) permasalahan komunikasi dengan deteni terkait bahasa;
- d) kurangnya jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan pengelola data kesehatan yang kedepannya akan mendukung izin resmi berdirinya sebuah klinik di Rudenim Pusat Tanjung Pinang yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan masyarakat.
- e) aplikasi SIMKIM masih terkendala dalam hal penghapusan data dan migrasi data;

## 3. Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi

- a) petugas pengamanan deteni masih kurang menguasai bela diri;
- b) terkendala dalam mengamani deteni dengan gangguan psikologis;
- c) tidak tersedianya blok khusus untuk pengungsi yang melanggar tata tertib;
- d) tidak adanya pagar tinggi disekitar Rumah Detensi Imigrasi Pusat guna meminimalisir pelarian deteni.
- e) proses pemulangan deteni terkendala dengan deteni yang tidak memiliki *travel document*, verifikasi status kewarganegaraan deteni, dan *final reject*;

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Rudenim Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai berikut :

1. **Kata Pengantar**, menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Rudenim Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023
2. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan ringkasan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 secara singkat
3. **Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika pelaporan;
4. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara singkat Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian-capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
6. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan saran serta rencana perbaikan di tahun yang akan datang

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagian sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis memiliki peran penting terhadap pencapaian sebuah organisasi. Sebuah organisasi termasuk sistem kerja Pemerintahan membutuhkan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur sehingga diharapkan dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut maka tujuan pembentukan dari sebuah organisasi dapat dicapai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Hal ini relevan arahan Presiden yang menghendaki pencapaian dalam kurun waktu lima tahun untuk meningkatkan produktivitas sebagai prioritas dimana pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tetapi harus berorientasi pada hasil. Presiden juga menghendaki bahwa tugas Pemerintah juga bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan semata, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan, dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat, atas dasar hal tersebut perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis menjadi penting untuk ditetapkan pada awal perencanaan program dan kegiatan.

Dengan mendasar kepada beberapa literatur maka makna yang dapat ditarik dari sebuah visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.

#### 1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**".

Sebagai bagian dari pemerintah dan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkanlah visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah "**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**".

## 2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a) Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- b) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- c) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- d) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
- e) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- f) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
- g) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- c) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- d) Terlindunginya hak asasi manusia;
- e) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;

- f) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- g) Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya yaitu perspektif *external stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* and *budget discipline*.

- a) SS 1 – Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b) SS 2 – Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c) SS 3 – Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik
- d) SS 4 – Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
- e) SS 5 – Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f) SS 6 – Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g) SS 7 – Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM
- h) SS 8 – Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Strategi Pencapaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Dalam Pencapaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Peningkatan pencapaian kinerja Rudenim Pusat Tanjung Pinang melalui Indeks Survei Masyarakat
	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Peningkatan pencapaian kinerja melalui Penegakan Hukum Keimigrasian
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik di Rudenim Pusat Tanjung Pinang

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran kegiatan Tahun 2023 secara terukur, tepat waktu dan akuntabel, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Perjanjian kinerja tersebut berisi indikator kinerja kegiatan yang menjadi alat ukur untuk mencapai kinerja pada tahun 2023. Berikut adalah Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

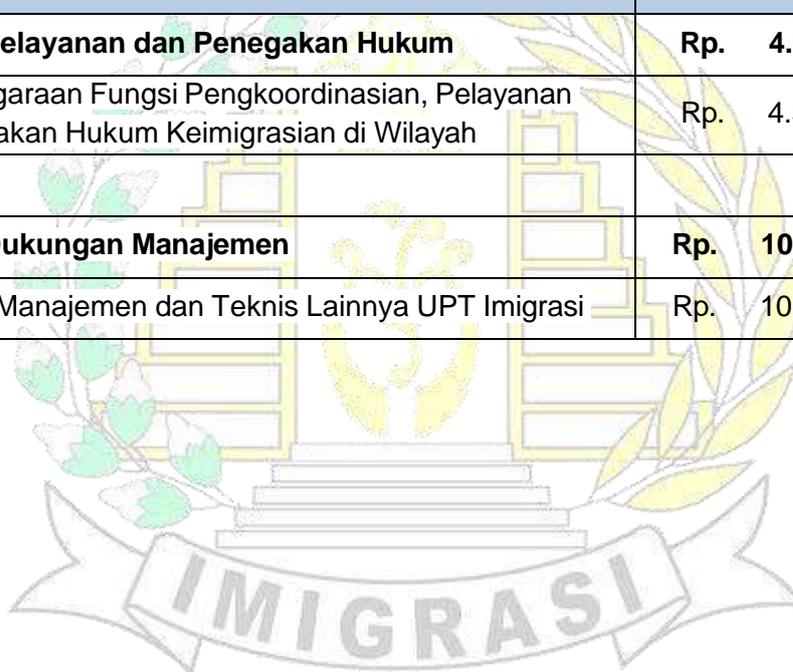
### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 Indeks
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 Indeks
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 4.569.172.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.569.172.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 10.689.462.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.689.462.000,-



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Rudenim Pusat Tanjung Pinang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan.

#### Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3,96 Indeks	124%
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,72 Indeks	119%
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks	3,87 Indeks	124%

#### Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,90 Indeks	120%
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,63 Indeks	116%
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks	3,86 Indeks	123%

**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023
Pagu	Rp 14.859.642.000	Rp 14.623.634.000
Realisasi	Rp 14.409.933.753	Rp 14.354.678.815
<b>Capaian</b>	<b>96,97%</b>	<b>98,16%</b>

**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
		(Rp)	%	
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>3.575.108.000</b>	<b>3.336.854.284</b>	<b>93,34</b>	<b>238.253.716</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	3.575.108.000	3.336.854.284	93,34	238.253.716
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>11.284.534.000</b>	<b>11.073.079.469</b>	<b>98,13</b>	<b>211.454.531</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	11.284.534.000	11.073.079.469	98,13	211.454.531

**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
		(Rp)	%	
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>4.236.917.000</b>	<b>4.059.527.979</b>	<b>95,81</b>	<b>177.389.021</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	4.236.917.000	4.059.527.979	95,81	177.389.021
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>10.386.717.000</b>	<b>10.295.150.836</b>	<b>99,12</b>	<b>91.566.164</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	10.386.717.000	10.295.150.836	99,12	91.566.164

Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dengan realisasi tahun 2023.

**Pengukuran Kinerja**

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi pada Tahun 2023}}{\text{Target pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

**1. SASARAN 1:**

**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran 1 ini merupakan Sasaran kegiatan pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sasaran Kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah dan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah. Berikut adalah sasaran 1 dan indikator kinerja Rudenim Pusat Tanjung Pinang yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,90	120%
	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,63	116%

**a. Indikator Kinerja Kegiatan 1:**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah.

Perbandingan antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,90	120%



**Pengukuran Kinerja:**

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi pada Tahun 2023}}{\text{Target pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{3,90}{3,25} \times 100\%$$

$$= 120\%$$

**Analisis:**

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Keimigrasian diukur melalui survey kepada responden terhadap layanan Keimigrasian yang dilaksanakan perbulan melalui aplikasi survei.balitbangkumham.go.id dan selanjutnya dirata-ratakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Target capaian Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian” pada tahun 2023 sebesar 3,25 Indeks dan realisasi sebesar 3,90 Indeks sehingga capaian tahun 2023 sebesar 120% dengan jumlah responden 375 orang.

Rudenim Pusat Tanjung Pinang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah yaitu melakukan pembinaan dan penguatan terhadap Rudenim Pusat Tanjung Pinang berupa Penerapan SOPAP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Rudenim Pusat Tanjung Pinang.

**Perbandingan antara Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Persentase		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3,15	3,20	3,25	3,86	3,96	3,90	123%	124%	120%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi  
Melibatkan pihak-pihak yang berwenang atau instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, LSM, dan Swasta.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Mengoptimalkan dalam pemakaian anggaran dan pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung.



- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Adanya sinergitas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengoptimalan pemakaian anggaran.

**b. Indikator Kinerja Kegiatan 2:**

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah  
Perbandingan antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,63	116%

**Pengukuran Kinerja:**

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi pada Tahun 2023}}{\text{Target pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pencapaian Target} &= \frac{3,63}{3,13} \times 100\% \\ &= 116\% \end{aligned}$$

**Analisis:**

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei dengan skala 4. Target capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 3,13 Indeks dan realisasi sebesar 3,63 Indeks sehingga capaian tahun 2023 sebesar 116%.

**Perbandingan antara Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Persentase		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,81	3,72	3,63	123%	119%	116%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi  
Keberhasilan kegiatan dapat dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sumber daya manusia dan anggaran yang mendukung serta adanya partisipasi dari beberapa Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dengan Wilayah kerjanya masing-masing.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Mengoptimalkan dalam pemakaian anggaran dan pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan  
Adanya sinergitas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengoptimalan pemakaian anggaran.

**2. SASARAN 2:**

**Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.**

Sasaran 2 merupakan Sasaran kegiatan Rudenim Pusat Tanjung Pinang sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sasaran Kegiatan ini diperoleh dengan melakukan survei internal integritas seluruh pegawai secara berkala melalui <https://survei.balitbangham.go.id>. Keseluruhan hasil survei dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan kepada pegawai dan mewujudkan *good government* yang sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Berikut sasaran 2 dan indikator kinerja Rudenim Pusat Tanjung Pinang yaitu:

**Perbandingan antara Target dan Realisasi**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks kepuasan internal di Wilayah	3,13	3,86	123%

**Pengukuran Kinerja:**

$$\text{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi pada Tahun 2023}}{\text{Target pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pencapaian Target} &= \frac{3,86}{3,13} \times 100\% \\ &= 123\% \end{aligned}$$

**Analisis:**

Target capaian Indikator “Indeks kepuasan internal di Wilayah” pada tahun 2023 sebesar 3,13 Indeks dan realisasi sebesar 3,86 Indeks sehingga capaian tahun 2023 sebesar 123,3% dengan total responden 1007 orang. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil upaya Rudenim Pusat Tanjung Pinang dalam peningkatan pelayanan kepada pegawai baik dalam sistem anti korupsi, SDM, anggaran dan penegakan aturan/norma yang tentu nya juga memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki untuk tahun mendatang. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai dianjurkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai aturan tanpa pungutan liar ataupun diskriminasi. Norma aturan juga telah ditegakkan, hal ini dibuktikan dengan adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik ASN dan aturan disiplin organisasi.

**Perbandingan antara Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Persentase		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,87	3,87	3,86	124%	124%	123%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi  
 Pemberian layanan internal kepada pegawai Rudenim Pusat Tanjung Pinang dikatakan berhasil mencapai target yang ditentukan karena adanya komitmen yang sungguh-sungguh oleh pegawai dalam memberikan layanan internal kepada pegawai.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
 Memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana prasarana yang ada.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan  
 Adanya komitmen dari pegawai untuk memberikan layanan internal yang baik.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Berikut merupakan data penyerapan anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tahun 2023. Penyerapan anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pusat tahun 2023 adalah Rp 14.354.678.815 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 98,16% dari total pagu sebesar Rp 14.623.634.000 (empat belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Adapun rincian Realisasi Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
		(Rp)	%	
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>4.236.917.000</b>	<b>4.059.527.979</b>	<b>95,81</b>	<b>177.389.021</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	4.236.917.000	4.059.527.979	95,81	177.389.021
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>10.386.717.000</b>	<b>10.295.150.836</b>	<b>99,12</b>	<b>91.566.164</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	10.386.717.000	10.295.150.836	99,12	91.566.164

**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023**

Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023
Pagu	Rp 14.859.642.000	Rp 14.623.634.000
Realisasi	Rp 14.409.933.753	Rp 14.354.678.815
<b>Capaian</b>	<b>96,97%</b>	<b>98,16%</b>

Realisasi anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

## 1. Rupiah Murni (RM)

Jenis Belanja	Pagu	Target		Realisasi		Sisa Dana	Ket
		(Rp)	%	(Rp)	%		
Belanja Pegawai	4.770.458.000	-	-	4.759.699.393	99,77	10.758.607	-
Belanja Barang	3.198.586.000	-	-	3.197.064.932	99,95	1.521.068	-
Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.969.044.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.956.764.325</b>	<b>99,85</b>	<b>12.279.675</b>	<b>-</b>

## 2. Pendapatan Non Pajak (PNP)

Jenis Belanja	Pagu	Target		Realisasi		Sisa Dana	Ket
		(Rp)	%	(Rp)	%		
Belanja Barang	5.661.338.000	-	-	5.413.352.490	95,62	247.985.510	-
Belanja Modal	993.252.000	-	-	984.562.000	99,13	8.690.000	-
Jumlah	<b>6.654.590.000</b>	-	-	<b>6.397.914.490</b>	<b>96,14</b>	<b>256.675.510</b>	-

## 3. Rupiah Murni + PNB

Jenis Belanja	Pagu	Target		Realisasi		Sisa Dana	Ket
		(Rp)	%	(Rp)	%		
Belanja Pegawai	4.770.458.000	-	-	4.759.699.393	99,77	10.758.607	-
Belanja Barang	8.859.924.000	-	-	8.610.417.422	97,18	249.506.578	-
Belanja Modal	993.252.000	-	-	984.562.000	99,13	8.690.000	-
Jumlah	<b>14.623.634.000</b>	-	-	<b>14.354.678.815</b>	<b>98,16</b>	<b>268.955.185</b>	-

## C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

## 1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka Rudenim Pusat Tanjung Pinang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART sampai dengan bulan Desember Tahun 2023:

No	Satker	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	97,14	98,16	85,25	100	20	100

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA diatas, nilai capaian kinerja dilingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang dianggap baik.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT DI TANJUNG PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sarker	Uraian Sarker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	009	013	577181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	87.30	92.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.32	100%	97.32
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	28			
					Nilai Akhir	10.00	8.73	18.59	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.85		98.59					100.00			

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sebesar **97,32**.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan HAM merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Adapun capaian kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Bulan Desember
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	100%
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	100%
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di wilayah	100%

Memperhatikan hasil persentase capaian kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang tahun 2023 maka hasil capaian kinerja sudah tercapai yaitu 100%.

2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang tidak melakukan pelaporan capaian target kinerja dan penilaian atas capaian target kinerja setiap bulannya.

3) *E-Monev* Bappenas

Aplikasi *E-Monev* Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian /lembaga) yang digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP.

No	Kode SATKER	SATKER	Persentase (%)
1	677181	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	100

Memperhatikan hasil persentase capaian kinerja berdasarkan aplikasi *E-Monev* Bappenas pada Rudenim Pusat Tanjung Pinang tahun 2023 maka hasil capaian kinerja sudah tercapai yaitu 100%.

4) Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Rumah Detensi Imigrasi tidak melakukan pelaporan capaian kinerja Prioritas Nasional.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penetapan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target suatu organisasi di akhir tahun, melainkan penetapan kinerja tersebut dijadikan sebagai bahan acuan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Dari uraian Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang yang meliputi kegiatan fasilitatif dan substantif selama tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan perencanaan;
2. Penyerapan anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pusat tahun 2023 adalah Rp 14.354.678.815 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau sebesar 98,16% dari total pagu sebesar Rp 14.623.634.000 (empat belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Secara umum, isu strategis dan kondisi yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang adalah:

1. Adanya keterbatasan beberapa pelaksanaan kegiatan disebabkan adanya keterbatasan anggaran mengingat letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau yang tidak terjangkau;
2. Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan;
3. Sarana dan prasarana pada tiap bidang masih minim (ruang penyimpanan arsip, blok khusus Deteni, kelancaran internet, CCTV, alat pengamanan beserta alat komunikasi, dll)

## B. SARAN

Mengacu pada isu strategis dan kondisi yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang diatas, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan dimasa mendatang yaitu:

1. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu adanya metode baru maupun inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan pemberdayaan sumber daya baik petugas maupun sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara efektif agar menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang sehingga terwujudnya pelayanan prima.

Demikian Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.





RUMAH DETENSI IMIGRASI  
PUSAT TANJUNG PINANG

# LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA  
RUMAH DETENSI IMIGRASI  
PUSAT TANJUNG PINANG

**2023**





Senin (13/02/2023), Rumah Detensi Imigrasi Pusat melaksanakan seleksi ketua dan anggota tim kelompok kerja (pokja) Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat, Agung Prianto, beserta Pejabat Administrator dan Pengawas. Seleksi ini dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural dan pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat serta memperhatikan rekam jejak dan daftar riwayat hidup pegawai seperti kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak bermasalah, dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik/disiplin.





## RUDENIM PUSAT IKUTI DISEMINASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA

f t i g y  
**RUDENIM PUSAT**

**BerAKHLAK** #banggamelayanibangsa





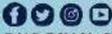


**RUMAH DETENSI  
IMIGRASI PUSAT**

28 Februari 2023

## LAYANAN KESEHATAN DETENI

*Rudenim Pusat bekerja sama dengan Puskesmas Sei Jang berikan layanan kesehatan kepada Deteni melalui program Puskesmas Keliling*

 RUDENIM PUSAT

**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa





**RUMAH DETENSI  
IMIGRASI PUSAT**

02 Maret 2023

## RAPAT KOORDINASI

*puncak kegiatan Rapat Koordinasi Kerja Sama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia sekaligus penutupan*

**BerAKHLAK** #bangga  
berorientasi Pelayanan akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani bangsa





**RUMAH DETENSI  
IMIGRASI PUSAT**

# KUMHAM SEHAT KUMHAM PRODUKTIF

03 Maret 2023

f t i @ y  
RUDENIM PUSAT

**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa





**RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT**

**73**  
HARI BHAKTI IMIGRASI KEMENKUMHAM RI

# Rudenim Pusat Awali pekan ini dengan Apel pagi Pegawai

*Apel pagi adalah kewajiban pegawai yang harus dilaksanakan, merupakan awal kedisiplinan dan keberhasilan kinerja*

f t i g+  
RUDENIM PUSAT

**BerAKHLAK** #bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani bangsa  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





08 Maret 2023

# DISEMINASI TATA CARA PENDATAAN DETENI, PENGUNGSI, PENCARI SUAKA DAN FINAL REJECT

**BerAKHLAK** #bangga  
#melayani  
#bangsa





RUMAH DETENSI  
IMIGRASI PUSAT



**BerAKHLAK** #bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa



**10 MARET 2023**  
**PERKUAT SINERGITAS  
RUDENIM PUSAT MEMANTAU PENGUNSI  
BERSAMA RUDENIM DENPASAR**



RUDENIM PUSAT







**PENANDATANGANAN KOMITMEN PELAKSANAAN AKSI  
PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2023 – 2024**

SEKALIGUS SILAHTURAHMI KELUARGA BESAR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADAN 1444 H / 2023

**15 MARET 2023**





Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang melaksanakan medical check up atau cek kesehatan terhadap 51 deteni, Jumat (24/03). Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi pengambilan darah lengkap dan urine dilanjutkan konsultasi dokter dibantu dengan tenaga penerjemah bahasa asing. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2023. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat, Agung Prianto mengatakan kegiatan ini merupakan layanan yang rutin dilaksanakan secara berkala dengan maksud mengetahui keluhan kesehatan deteni.





**PENDETENSIAN 5 WN NIGERIA**

**RUDENIM PUSAT LAKUKAN PENDETENSIAN 5 WARGA NEGARA NIGERIA DARI KANIM KELAS I KHUSUS SOEKARNO-HATTA**

**27 MARET 2023**





**RUDENIM  
PUSAT**



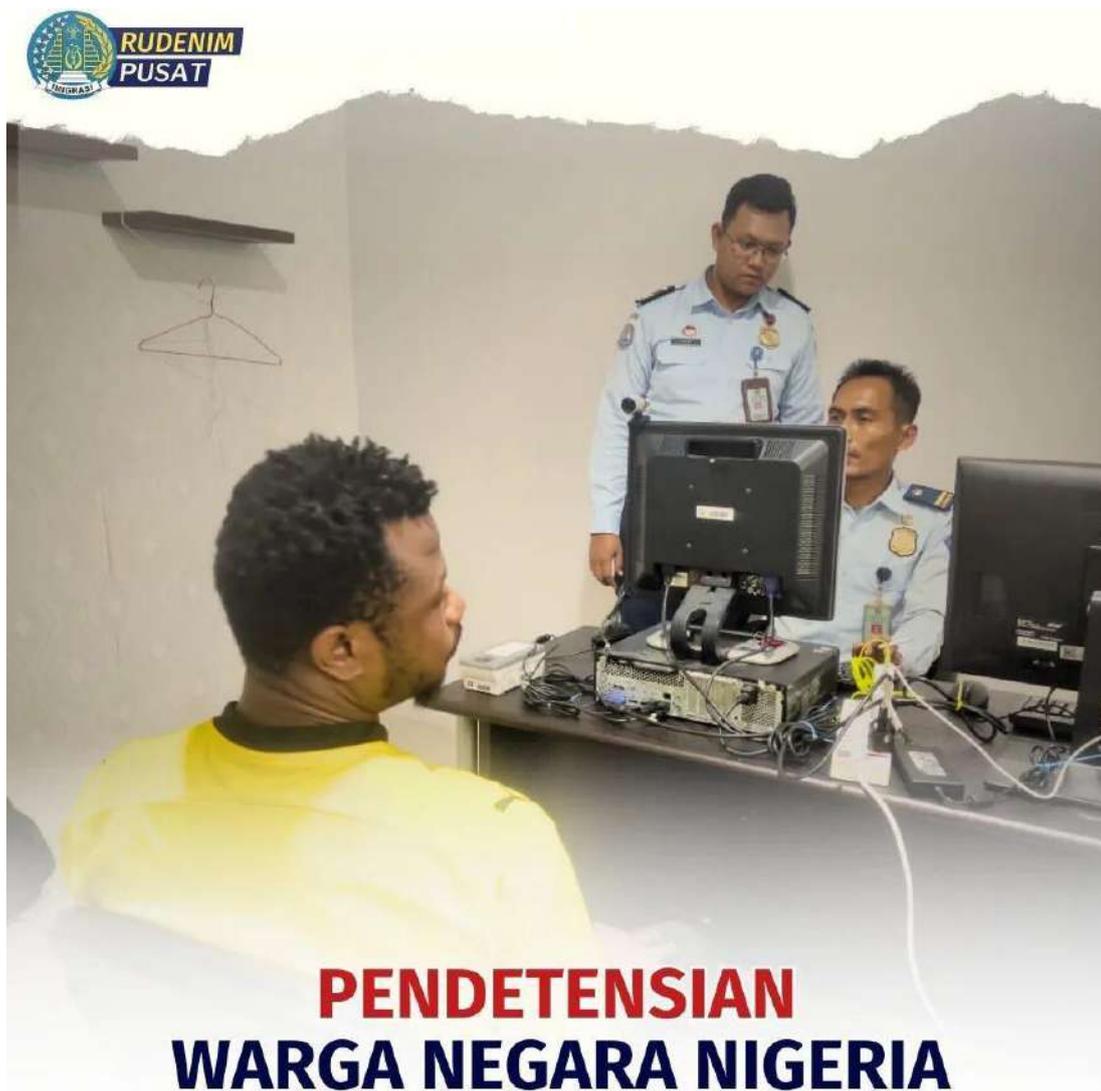
**OPTIMALISASI PENGAWASAN KEAMANAN,  
RUDENIM PUSAT LAKUKAN SIDAK BLOK DETENI  
28 MARET 2023**

    **RUDENIM PUSAT** **BerAKHLAK**  **#bangga**  **melayani**  
Committed. Dedicated. Accountable. Competent.  
Ramah. Loyal. Adaptif. Kolaboratif.



Pada Rabu (31/05/2023), Rumah Detensi Imigrasi Pusat mendetensi 1 Deteni Warga Negara Nigeria dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Adapun proses masuknya calon Deteni yang dilakukan Bidang Registrasi dan Perawatan (Regwat) sebagai berikut:

1. Pengecekan kesehatan Deteni oleh Seksi Kesehatan;
2. Pengecekan barang bawaan dan peregistrasian berkas/data Deteni oleh Seksi RAP (Registrasi, Administrasi dan Pelaporan);
3. Proses penempatan ke blok masing-masing oleh Seksi Penempatan dan Petugas Pengamanan (Seksi Keamanan);
4. Serah terima kebutuhan perlengkapan Deteni seperti masker, peralatan mandi, kasur, makan malam, dan lain-lain oleh Seksi Perawatan di Blok Hunian.



## **PENDETENSIAN WARGA NEGARA NIGERIA**

*pelanggar Keimigrasian berupa tidak memiliki Dokumen  
Perjalanan dan izin tinggal yang sah dan berlaku*

Pada Kamis (22/06/2023), Rumah Detensi Imigrasi Pusat mendetensi 8 Deteni Warga Negara Myanmar dari Rumah Detensi Imigrasi Medan.



## **PENDETENSIAN 8 WARGA NEGARA MYANMAR**

*pelanggar Keimigrasian berupa melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan*

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat sesuai angka V angka 2 huruf f angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi, Bidang Registrasi dan Perawatan melalui Seksi Kesehatan bertugas memberikan Deteni waktu untuk kegiatan penyegaran/hiburan dimana salah satunya yaitu olahraga senam guna meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan kebersihan diri Deteni.



## SENAM DETENI



Senam/olahraga Deteni bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Deteni selama berada dalam masa Pendetensian di Rudenim Pusat Tanjung Pinang







## RANGKAIAN HARI LAHIR KEMENKUMHAM KE-78 KANWIL KEMENKUMHAM KEPRI SALURKAN BANTUAN PEDULI STUNTING





Pada Rabu (02/08/2023), Rumah Detensi Imigrasi Pusat melakukan kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Seluruh Blok Hunian Deteni. Sebelumnya diadakan briefing terlebih dahulu dengan pegawai yang akan menyidak yang dipimpin Kepala Seksi Keamanan, Sony Septadi, dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Kegiatan sidak ini dilakukan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan menjaga situasi keamanan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat.



Masih dalam semarak memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78, pada Minggu (06/08/2023), diadakan Senam Bersama dan Kemenkumham Legal Expo di Gedung Gonggong Tepi Laut Tanjungpinang. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Achmad Fahrurazi, dan dilanjutkan dengan senam pagi bersama oleh pegawai Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasarakatan se-Bintan.

Selain itu, adanya Kemenkumham Legal Expo yang membuka pelayanan publik dalam layanan Imigrasi (paspor merdeka kuota 50 orang), Pemasarakatan (pameran hasil karya dan pentas seni warga binaan), Administrasi Hukum Umum (apostille dan perseoran perorangan), serta Kekayaan Intelektual.







**PENGUATAN PENYUSUNAN LHI**  
**RUDENIM PUSAT MENERIMA PENGUATAN DALAM**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HARIAN INTELIJEN OLEH**  
**DIRWASDAKIM**

29 AGUSTUS 2023



Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat, Agung Prianto, melakukan sosialisasi rencana kegiatan Peningkatan Mitigasi dan Pencegahan Bencana Kebakaran dan Kerusakan di Lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pusat kepada seluruh Petugas Pengamanan Deteni. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan SDM para Petugas Pengamanan Deteni dengan diadakan pelatihan pemadam kebakaran serta huru-hara sebagai bentuk mitigasi bencana non-alam di Rumah Detensi Imigrasi Pusat.



## **SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN**

Kepala Rudenim Pusat memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada seluruh petugas Pengamanan Rudenim Pusat terkait rencana kegiatan Peningkatan Mitigasi dan Pencegahan Bencana Kebakaran dan Kerusakan di Rudenim Pusat

RUDENIM PUSAT







**RUDENIM PUSAT**

# RUDENIM PUSAT LAKUKAN PENDETENSIAN 7 WNA TIONGKOK

14 SEPTEMBER 2023

**RUDENIM PUSAT** **BerAKHLAK** **#bangga melayani bangsa**







Rudenim Pusat Tanjung Pinang Menerima Piagam Penghargaan Oleh KPPN Tanjung Pinang Sebagai Terbaik Ketiga Satker Berprestasi Atas Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang Periode Triwulan I Tahun 2023







**RUDENIM PUSAT TANJUNG PINANG MENGHADIRI  
RAPAT KOORDINASI PENANGANAN  
PMI NON PROSEDURAL DAN TPPO**

21 SEPTEMBER 2023







**RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT**

**PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)  
BERSAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KOTA TANJUNG PINANG**

22 SEPTEMBER 2023



**RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT**

Pada Jumat (29/09/2023), Rumah Detensi Imigrasi Pusat mendetensi 2 Deteni Warga Negara Vietnam dari Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa. Adapun proses masuknya calon Deteni yang dilakukan Bidang Registrasi dan Perawatan (Regwat) sebagai berikut:

1. Pengecekan kesehatan Deteni oleh Seksi Kesehatan;
2. Pengecekan barang bawaan dan peregistrasian berkas/data Deteni oleh Seksi RAP (Registrasi, Administrasi dan Pelaporan);
3. Proses penempatan ke blok masing-masing oleh Seksi Penempatan dan Petugas Pengamanan (Seksi Keamanan);
4. Serah terima kebutuhan perlengkapan Deteni seperti masker, peralatan mandi, kasur, makan malam, dan lain-lain oleh Seksi Perawatan di Blok Hunian.





**RUDENIM PUSAT** **DI ZONA INTEGRITAS**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANJUNGPINANG**



**RUDENIM PUSAT MELAKUKAN STUDI TIRU  
KLINIK PRATAMA LAPAS KELAS IIA TANJUNG PINANG  
DAN RUTAN KELAS I TANJUNG PINANG**

**RUDENIM PUSAT** **BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**







**RUDENIM PUSAT**

**PENGANTAMAN**

**IMIGRASI**

# RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT

**TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN, RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG LAKUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN UPTD PUSKESMAS SEI JANG TANJUNGPINANG**

**10 OKTOBER 2023**

**RUDENIM PUSAT** **BerAKHLAK** **bangga melayani bangsa**







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG

KLINIK PRATAMA  
RUDENIM PUSAT

# Selamat Datang DI KLINIK PRATAMA RUDENIM PUSAT

SENIN - JUM'AT  
08.00 - 17.00 WIB















**RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN  
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPRI**

**RUDENIM PUSAT** **BerAKHLAK** **#bangga melayani bangsa**





## UPAYA BERSAMA MENANGGULANGI TUBERKULOSIS DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR : SKRINING KESEHATAN OLEH PUSKESMAS SEI JANG UNTUK MENDETEKSI DINI DAN MEMUTUS RANTAI PENYAKIT

15 NOVEMBER 2023

RUDENIM PUSAT BerAKHLAK bangga melayani bangsa



Pada hari Selasa (12/12/2023), Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Agung Prianto dan Kepala Subbagian Kepegawaian Rinka Purnama Sari memberikan sosialisasi kepegawaian pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sosialisasi ini bertujuan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kedisiplinan pegawai di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pusat.



## TERUS BERUPAYA TINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI

Rudenim Pusat berikan sosialisasi PP No. 94 Tahun 2021



## Rudenim Pusat ikuti **APEL SIAGA NATAL DAN TAHUN BARU** sekaligus Peresmian Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Pinang





Pada hari Sabtu (23/12/2023) Rumah Detensi Imigrasi Pusat bersama Federasi Kempo Indonesia Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Ujian Kenaikan Tingkat dan Pusat Pelatihan Teknik Terpadu yang diikuti seluruh Petugas Pengamanan Deteni di Ruang Aula.

Kegiatan ini disaksikan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Agung Prianto dan Kepala Seksi Keamanan Sony Septiadi. Pelatihan Bela Diri Kempo ini sebagai bentuk pengembangan SDM bagi Petugas Pengamanan Deteni untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pusat.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Prianto  
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Saffar Muhammad Godam  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Saffar Muhammad Godam  
NIP. 196506021992031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat  
Tanjung Pinang



Agung Prianto  
NIP. 197208271999031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 4.569.172.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 4.569.172.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 10.689.462.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.689.462.000,-

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Saffar Muhammad Godam  
NIP. 196506021992031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat  
Tanjung Pinang



Agung Prianto  
NIP. 198271999031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Prianto

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat  
Tanjung Pinang



Agung Prianto  
197208271999031002